ABSTRAK

Andi Rishadi: *Urgensi Hak Anak dalam Memberikan Izin Berpoligami Perspektif Hak Asasi Manusia dan Sadd adz-Dzarî'ah,* di bawah bimbingan I: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan II: Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A. pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2023).

Kata Kunci: Hak Anak, Izin Poligami, Hak Asasi Manusia, Sadd Adz-Dzarî'ah**.**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pengamatan bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak jarang ditemukan adanya keluarga poligami. Hal ini mungkin terlihat lumrah, namun tidak banyak pelaku poligami yang memikirkan dampak dari poligami itu sendiri. Anak sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam keluarga poligami, baik secara fisik maupun psikis. Keterlibatan anak untuk memberikan izin poligami terhadap orang tuanya kiranya sangat potensial di era sekarang ini. Izin tersebut berperan sebagai upaya perlindungan kemungkinan terancamnya hak-hak anak dan diskriminasi dalam keluarga. Jika selama ini hak istri yang akan dipoligami dilindungi oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya hak anak juga menjadi bahan pertimbangan. Sebagaimana istri, anak juga berhak didengar pendapatnya ketika ayahnya ingin melakukan poligami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan *philosophical approach*, *historical approach*, dan *analytical approach*. Untuk bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter, setelahnya akan dianalisis secara kualitatif. Untuk menjawab rumusan masalah akan digunakan teori perlindungan hukum, teori keadilan, teori perkawinan, tata cara poligami, teori hak asasi manusia dan teori *sadd adz-dzarî'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang hak asasi manusia keikutsertaan anak dalam pemberian izin poligami merupakan hal yang urgen, mengingat banyaknya anak yang menjadi korban kekerasan dan hak asasinya terabaikan. Pemberian hak kepada anak dalam proses perizinan poligami adalah bagian dari upaya penjaminan kelangsungan hidup anak dan hak tersebut diberikan karena alasan kemanusian terlepas dari berapa pun usia anak tersebut, baik ia laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dari tinjauan metode *saad adz-dzarî'ah*, pernikahan poligami yang tanpa melibatkan izin dari istri dan anak-anaknya termasuk dalam kriteria *dzarî'ah* sebab hal itu berpotensi membawa kemafsadatan kepada anak serta istri. Jika pernikahan poligami tersebut disembunyikan, maka juga bisa menyebabkan keburaman dalam hal keturunan.

ABSTRACT

Andi Rishadi: 190211050098. The Urgency of Children's Rights in Granting Permission to Polygamy From Human Rights Perspective and Sadd adz-Dzarî'ah, Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. and Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., in the Master of Family Law Program at Postgraduate UIN Antasari Banjarmasin. (2023).

Keywords: Children's Rights, Polygamy Permit, Human Rights, Sadd adz-Dzarî'ah.

This research was conducted based on the observation that in social life it's not uncommon to find polygamous families. This may seem commonplace, but not many polygamists think about the impact of polygamy itself. Children are often the losers in polygamous families, both physically and psychologically. The involvement of children in giving permission for polygamy to their parents is very potential in this era. The permit acts as an effort to protect the possibility of threats to children's rights and discrimination within the family. If so far the rights of wife to be polygamous are protected by law, then children's rights should also be taken into consideration. Like a wife, children also have the right to have their opinions heard when their father wants to practice polygamy.

This type of research is normative legal research, using a philosophical approach, historical approach, and analytical approach. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The three legal materials were collected using documentary study techniques, after that they will be analyzed qualitatively. To answer the formulation of the problem, will be used the theory of legal protection, the theory of justice, the theory of marriage, procedures for polygamy, the theory of human rights and the theory of sadd adz-dzarî'ah.

The study's results show that from a human rights point of view, the participation of children in granting permission for polygamy is urgent, given the large number of children who are victims of violence and their human rights are neglected. Granting rights to children in the process of licensing polygamy is part of an effort to guarantee the survival of children and these rights are given for humanitarian reasons regardless of the age of the child, be it male or female. Meanwhile, from a review of the sadd adz-dzarî'ah method, polygamous marriages without involving the permission of the wife and children are included in the dzarî'ah criteria because it has potential to bring harm to the children and wife. If the polygamous marriage is hidden, it can also cause opacity in offspring.